



PRAKTIK CERDAS DARI
KABUPATEN TAKALAR

BUMDES AIR BERSIH DAN SANITASI, MENGAPA TIDAK?

Takalar ditakdirkan menjadi salah satu kabupaten yang harus berjuang ekstra keras untuk bergerak lepas dari tiga peringkat terendah Indeks Pembangunan Manusia-nya (IPM) Sulawesi Selatan. Saat ini, Takalar berada di posisi 22 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Menurut BPS Takalar, IPM Takalar pada 2013 pada poin 62,58, kemudian meningkat menjadi 63,53 pada tahun 2014. Sedangkan IPM Sulsel sebesar 67,92, meningkat menjadi 68,49 pada

tahun 2014. Jika melihat perbandingan IPM Sulsel dengan Takalar, khususnya indeks kesehatan, ada selisih 5,68 poin. Meskipun semua indeks mengalami peningkatan tiga tahun terakhir namun pemerintah Kabupaten Takalar masih memerlukan strategi tepat untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan.

Upaya untuk keluar dari kesan 'tidak sejahtera' tersebut sudah semestinya melibatkan semua pihak di kabupaten yang bertetangga dengan Kota Makassar ini.

Mereka harusnya bisa terlecut untuk menguatkan dirinya di bidang kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi. Menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi di Takalar harus dimulai dengan membangun kesadaran pada potensi sumber daya yang ada. Pada apa yang tersedia dan yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi segala dinamika yang muncul kedepannya.

Momentum UU Desa 6/2014 seharusnya bisa menjadi alas yang baik untuk kembali melihat posisi Desa/Kelurahan di Takalar serta kapasitas apa yang dibutuhkan terkait dinamikanya. Salah satu antisipasi agar desa bisa menghidupi dirinya sehingga tidak membebani level di atasnya adalah dengan mengembangkan organisasi pengelola yang tidak saja cakap dalam memfasilitasi perencanaan pencarian solusi tetapi melayani warga desa dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Harapan untuk mewujudkan hal tersebut mulai terlihat, melihat kiprah dan inovasi perencanaan dan pelaksanaan amanat UU Desa No. 6/2014 di Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Di desa ini, telah berdiri Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang mengurus ketersediaan air bersih untuk warga setempat. Desa Kalukubodo memiliki tiga dusun, yakni Dusun Pa'battoang, Bilayya dan Kalukubodo. Desa ini baru saja berdiri pada tahun 2012 dan sudah dapat memperoleh predikat sebagai salah satu dari 15 Desa Mandiri di Takalar. Hal tersebut dikarenakan adanya Badan Usaha Milik Desa Daya Guna yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.

BUMDES DAYA GUNA

Badan Usaha Milik Desa sebagai 'perangkat' dalam penjabaran UU Desa No. 6/2014 tak bisa dilihat hanya mengurus aspek keuangan dan usaha ekonomi produksi komoditas belaka. Bumdes sejatinya bisa

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sarana prasarana bantuan seperti instalasi air bersih itu tidak mudah sebab warga kerap apatis dan tak peduli ketika ada yang rusak atau tidak berjalan baik.

merambah ceruk bisnis yang selama ini tak dilirik desa, salah satunya bisnis air bersih. Di Kalukubodo, terdapat organisasi pengelola informal bernama Bumdes 'Daya Guna' yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten Takalar dan UNICEF. Organisasi ini telah melahirkan harapan untuk pengelolaan air bersih.

Bumdes Daya Guna ini hadir setelah melihat usaha yang sudah berjalan menguntungkan bagi desa dan membutuhkan wadah resmi. BUMDes menjadi inspirasi bagi masyarakat dan sangat disegani di mata masyarakat. Ketika ada pemasangan pipa untuk masyarakat yang membutuhkan air bersih maka BUMDes langsung turun tangan untuk pemasangan pipa dan keran.

Biaya pemasangan awal pipa air masih gratis, nantinya setelah ada warga yang menyusul barulah dikenakan biaya pemasangan. Pembangunan reservoir memakan waktu 1 tahun dan dikontrol oleh masyarakat sehingga air dapat mengalir ke seluruh desa. Hingga kini, BUMDes telah mempunyai 198 pelanggan.

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sarana prasarana bantuan seperti instalasi air bersih itu tidak mudah sebab warga kerap apatis dan tak peduli ketika ada yang rusak atau tidak berjalan baik. Namun demikian, hal itu bisa ditangani setelah ada komunikasi dan pendampingan.

PENGELOLAAN DANA DESA

Apa yang dicapai Desa Kalukubodo dalam merintis Bumdes Daya Guna ini tak lepas dari kepemimpinan Kepala Desa Kalukubodo, Abdul Gaffar Rate. Sejak menjadi desa pada tahun 2012, berbagai terobosan ditempuh oleh kepala desa terpilih. Yang pokok adalah praktik pengelolaan keuangan desa secara transparan. Pemerintah Desa membuka informasi ke publik tentang dana dan program yang dilaksanakan. Kepala desa setuju untuk memajang item anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDesa di kantor desa. Semua dihitung secara terperinci mulai dari pendapatan, nilai belanja, hingga anggaran pembiayaan desa.

Sebagai informasi, Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) telah dituangkan di APBDesa dan dipublikasikan ke umum. Untuk APBDesa 2014-2015 misalnya, Desa Kalukubodo mempunyai anggaran senilai 411.019.000. Anggaran itu berasal dari Dana Desa sebesar Rp 289.420.000 dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebanyak Rp 121.599.000. Salah satu usaha yang dibiayai oleh dana desa adalah instalasi air sumur bor dimana Bumdes akan mengelolanya.

Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Kalukubodo pernah pula menjalin kerjasama dengan Indonesia Budget Center (IBC) dengan menggelar Pelatihan Pengelolaan Keuangan di Desa Kalukubodo pada tanggal 27-30, September 2015. Terdapat 16 orang yang terdiri dari perangkat desa, kepala desa, sekretaris, bendahara, kepala urusan, kepala dusun, BPD, LPM, posyandu, PKK, dan warga yang ikut dalam pelatihan ini. Pelatihan ini

bertujuan untuk membantu perangkat desa dan masyarakat memahami prinsip-prinsip keuangan desa, peran tim pengelola, azas dan nilai serta substansi pengelolaan keuangan desa.

INOVASI LUAR BIASA

Apa yang ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan ini merupakan inovasi luar biasa sebab dapat memanfaatkan momentum pengalaman mengelola bantuan program seperti dari UNICEF dan mentransformasi kapasitas untuk kemudian mendirikan Badan Usaha Milik Desa bernama Daya Guna. Sebuah inisiatif layak dipuji sebab dengan demikian warga tidak akan kesulitan lagi dalam memenuhi kebutuhan airnya.

Kepala Desa Gaffar serta Ketua Bumdes Rahman adalah dua sosok yang berhasil menghidupkan harapan dari desa, desa yang sejatinya punya potensi ketimbang keluh-kesah. Keduanya bisa melepas predikat bergantung pada pihak luar untuk membereskan persoalan sendiri. PDAM *ala* Kalukubodoa telah berdiri, dengan demikian, warga desa sejatinya telah mengambil bagian dalam memperbaiki kualitas hidup mereka, dan jika ini berlaku masif, pada tidak kurang 33 desa pesisir dan pulau di Takalar, bukan tidak mungkin IPM Takalar akan merangsek naik dari urutan 22.

Bumdes untuk layanan air bersih dan sanitasi warga adalah hal yang niscaya, kenapa tidak untuk mencobanya di desa anda, jika memang kesulitan air bersih? ■

